

## PERANAN JENDRAL SUHARTO DALAM MELAHIRKAN ORDE BARU TAHUN 1965-1968.

Oleh:

Tri Desy Endrayani, Suharman, E. Wagiyah.

### **Abstrak**

*Suharto lahir di Kemusuk Yogyakarta tanggal 8 Juni 1921. Setelah lulus SD Suharto masuk dalam keprajuritan sampai akhirnya ia terpilih menjadi prajurit teladan di sekolah Bintara. Ia resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945, kemudian bergabung dalam KNIL, PETA, kelompok Pathuk di Yogyakarta dan masuk menjadi anggota tentara RI. Dalam kemiliteran Suharto berhasil menumpas PKI yang dicurigai dalang dari pergerakan G30S/PKI. Perjuangan Suharto dalam merintis stabilitas politik nasional menimbulkan kepercayaan rakyat, akhirnya melalui ketetapan MPRS/1966 Suharto diangkat menjadi Presiden. Setelah Suharto mendapatkan kepercayaan dari rakyat maka mulailah apa yang disebut dengan era Orde Baru. Sejak Suharto menjadi Presiden maka terjadilah sentralitas kekuasaan. Kebijakan itu awalnya diambil untuk stabilitas yang bersifat penyelamatan. Dampak dari kebijakan ini adalah terwujudnya stabilitas politik sehingga perekonomian rakyat dapat meningkat. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, social budaya, keamanan, dan politik. Semua itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia.*

**Kata kunci:** Peran Suharto, Orde Baru, 1965-1968

### **Latar Belakang**

Orde baru sebagai pengganti Orde lama memiliki arti penting bagi bangsa ini. Orde baru merupakan sebutan pada pemerintahan kepemimpinan Suharto untuk membedakan dari Orde lama pada zaman Sukarno (M.C. Ricklefs, 1989:431). Suatu Masa kepemimpinan Suharto yang sangat panjang dan banyak meninggalkan sejarah penting bagi perkembangan bangsa Indonesia Orde baru berjalan selama 32 tahun sejak tahun 1968 saat Suharto dilantik menjadi presiden yang ke dua sampai tahun 1998 saat kegagalan beliau meredamkan kekacauan di Indonesia. Sedangkan Orde lama merupakan sebutan bagi pemerintahan Sukarno, yakni presiden Indonesia pertama yang menjabat pada tahun 1945 sampai dengan 1965.

Terjadinya pemberontakan PKI tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut melatar belakangi lahirnya orde baru. Pemberontakan itu mendapat kencaman keras dari masyarakat, termasuk dari Organisasi Masa/Ormas dan Mahasiswa Indonesia. Sebagai negara yang

demokrasi banyak ormas dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi atas kejadian tersebut serta menuntut pembubaran PKI. Untuk menekan timbulnya situasi yang semakin buruk maka Presiden Sukarno membuat Surat Perintah kepada Letnan Suharto yang saat ini kita kenal dengan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret.

Atas dasar surat perintah itu maka Letnan Suharto keesokan harinya (lewat tengah malam 11 Maret) sesudah menerima surat perintah tersebut dari ketiga perwira tinggi yang menghadap presiden Sukarno di Bogor adalah membubarkan dan melarang PKI beserta Organisasi masanya yang bernaung dan berlandung ataupun seases dengannya di seluruh wilayah Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Berdasarkan latarbelakang tersebut, kemudian peneliti memfokuskan pada Peran Jendral Suharto dalam melahirkan Orde Baru tahun 1965 – 1968

### **Latar Belakang Kehidupan Jendral Suharto**

Suharto adalah presiden ke dua setelah Sukarno. Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo Sedayu Bantul pada 8 Juni 1921. Suharto adalah anak laki-laki dari Kertosudiro alias Panjang, seorang petani dan pembantu lurah dalam pengairan sawah desa (*ulu-ulu*). Sedangkan ibunya bernama Sukirah. Sebelum genap 40 hari bayi Suharto dititipkan kepada Mbah Kromo, Sukirah kemudian menghilang selama 40 hari lamanya. Tak seorangpun yang tahu kemana ia pergi. Bersama Mbah Kromo, Suharto kecil dalam gendongan selalu diajak ke sawah, membalik-balik sawah dan menggaru (Taufik Adi Susilo 2016:12-13). Suharto masuk sekolah ketika berumur 8 tahun tetapi sering berpindah sekolah. Semula dia disekolahkan di SD Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes karena ibu dan bapaknya pindah ke Kemusuk Kidul. Kartosudiro kemudian memindahkan Suharto ke Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Disana Suharto dititipkan kepada adik perempuan Kartosudiro yang menikah dengan Prawirowihardjo alias pak Bei, seorang mantri tani.

Rasa cinta dan ingin menyaksikan bagian dari tanah air adalah salah satu motivasi yang menggugah Suharto untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit KNIL (*Koninklijk Nederlans Indische Leger*). Atas penampilan fisik yang sehat dan tegap yang disertai kecerdasan otak, Suharto diterima sebagai siswa militer di Gombong, Jawa Tengah sejak 1 Juni 1940. Enam bulan setelah menjalani latihan dasar, dia tamat

sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan mendapat pangkat Kopral di usia 19 tahun (Mosanto Luka, 2008:260). Pada tahun 1947 Suharto menikah dengan Siti Hartinah, putri seorang pegawai Keraton Magkunegara, Surakarta. Pernikahan Suharto dan Siti Hartinah dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Suharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikarunia enam orang anak putra dan putri yaitu Siti Hardijanti, Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Sebelum mejadi presiden Suharto menghabiskan karirnya dibidang militer.

Suharto meninggal pada Minggu, 27 Januari 2008 saat berusia 87 tahun. Sebelumnya ia dirawat selama 24 hari yakni sejak tanggal 4 sampai 27 Januari di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Penyebab Suharto meninggal adalah karena kegagalan multiorgan. Esok harinya pada Senin, 28 Januari 2008, jenazah beliau diserahkan oleh pihak keluarga kepada pemerintah. Selanjutnya diberangkatkan ke Solo dengan pesawat terbang AURI untuk kemudian dimakamkan di Kompleks Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah. Suharto dikebumikan di sisi almarhum sang istri yaitu Ibu Tien Suharto sesuai dengan wasiatnya (Agustina Soebachman, 2015: 73).

### **Suharto Terjun Dalam Bidang Politik**

Pada masa peralihan Orde lama ke Orde Baru dimana pergolakan politik terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1960 yaitu presiden pertama yang menjabat selama 21 tahun Sukarno digulingkan dari kekuasaannya oleh Letjen Suharto. Surat perintah sebelas maret 1966 atau Supersemar itulah yang menjadi titik awal lahirnya Orde Baru. Isi surat itu intinya adalah perintah untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Dengan Supersemar Letjen Suharto kemudian membubarkan PKI dan mengambil tindakan-tindakan pembaruan dan stabilisasi politik. Karena Supersemar itulah kekuasaan Sukarno dengan sistem politik demokrasi terpimpin menjadi lenyap. Lenyapnya kekuasaan Sukarno kemudian dapat diperkuat dengan ketetapan MPRS yang melalui sidang istimewa pada tahun 1967 mengangkat Letjen Suharto sebagai pejabat presiden, sekaligus Sukarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian pada

bulan Maret 1968 MPRS mengangkat dan melantik Letjen Suharto sebagai Presiden (Marwati Djonet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984: 415).

### **Perjuangan Suharto Sebelum Tahun 1966**

Nama Mayjen Suharto melambung ketika terjadi peristiwa serangan fajar 1 Maret 1959 yang dilakukan pada pagi hari dalam peristiwa perang gerilya melawan Belanda hingga nama Indonesia dianggap sebagai Negara yang berdaulat dengan bukti ketangguhan dari para militernya. Sejak kejadian dramatis pada tanggal 1 Oktober 1965, muncul berbagai pertanyaan terhadap sikap Mayjen Suharto yang sangat menentukan dalam perkembangan lebih lanjut. Yang dalam catatan sejarah bangsa Indonesia menyimpulkan bahwa penumpasan PKI paska peristiwa 1965 tidak akan berhasil tanpa adanya Mayjen Suharto.

Dalam Militer Mayjen Suharto pernah bergabung dalam KNIL (Koninklijk Negerlands Indische Leger), setelah Belanda menyerah kepada Jepang Mayjen Suharto bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA). Ketika Jepang kalah dan Peta dibubarkan, Mayjen Suharto bergabung dengan kaum penggerak Yogyakarta Dayno yang lebih dikenal dengan kelompok Pathuk di Yogyakarta dan setelah itu Mayjen masuk menjadi anggota militer RI. Kedua, adalah serangan Umum Satu Maret 1949 adalah meningkatnya citra Mayjen Suharto yang berhasil menumpas Belanda dari Yogyakarta hanya dengan enam jam. Dan terakhir peran sentral Mayjen Suharto dalam penumpasan G30S/PKI tahun 1966 dan keberhasilannya menggantikan Sukarno, hingga menjadi Presiden RI ke-2.

### **Pergolakan Berkait G30S/PKI**

Pada awal tahun 1965 PKI meniupkan isu adanya Dewan Jendral yang merupakan kelompok dari para jendral yang bertugas memberi solusi kenaikan pangkat kolonel menjadi jendral. Dewan jendral oleh PKI diartikan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan terhadap presiden Sukarno. Arti tersebut

berdasarkan laporan Menteri luar Negeri Dr. Subandrio yang menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelligence (BPI).

Lewat Dewan Revolusi PKI memandang perlu untuk mendahului rencana Dewan Jendral yang diperkirakan oleh PKI akan mengadakan *Coup de'tat* (perebutan kekuasaan) pada tanggal 5 Oktober 1965 bersamaan dengan hut ABRI. Dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa (pengawal Sukarno), Dewan Revolusi menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat di Jakarta, yaitu Jendral Ahmad Yani, Suprpto, M. T. Haryono, S. Parman, D. I. Panjaitan, Sutoyo Siswomihardjo, Piere A, Tendean dan Satsuit Tubun, sedangkan di Yogyakarta Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono, masing-masing Komandan dan Kepala Saf Residen 072 Pamungkas juga dibunuh secara kejam (Sartono Kartodirdjo, 1975: 121).

Peristiwa G30S/PKI oleh Presiden Sukarno ditanggapi dengan biasa-biasa saja. Ia memang mengutuk pembunuhan terhadap para Jendral tetapi mengumumkan kepada rakyat Indonesia agar tidak terlalu membesar-besarkan G30S/PKI sebab menurutnya hal ini biasa dan wajar terjadi dalam perjalanan Revolusi. Pernyataan Presiden Sukarno itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan demonstrasi agar Presiden Sukarno membubarkan PKI beserta Ormas-ormasnya. Tuntutan pembubaran PKI juga dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) (Marshall Green, 1990: 78).

Banyaknya persoalan yang ada menyebabkan mereka untuk mempertegas konsep perjuangan. Pada tanggal 10 Januari 1966 di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, KAMI mencetuskan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yaitu :Bubarkan PKI,Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI,Turunkan Harga-harga Barang (G. Moedjanto, 1988: 145).Tindakan pembubaran PKI ini diikuti dengan penangkapan terhadap 15 orang menteri yang terlibat dalam G30S/PKI. Pembubaran PKI dan penangkapan terhadap menteri yang terlibat dalam G30S/PKI ini merupakan pemenuhan pemerintah terhadap aksi-aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Mereka menuntut pembersihan kabinet Dwikora yang berisikan menteri-menteri yang tindakannya menguntungkan PKI. Penangkapan terhadap 15 menteri tersebut bertujuan agar pemerintah bersih dari

unsur-unsur PKI sehingga kehidupan politik diharapkan dapat stabil. Tidak hanya pada bidang politik Mayjen Suharto Juga menstabilkan gejolak di bidang Ekonomi.

### **LAHIRNYA SUPERSEMAR**

Surat Perintah 11 Maret atau yang sering disebut Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah wewenang untuk Suharto selaku Panglima Komando Operasional Keamanan dan ketertiban untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi yang buruk pada saat itu. Akhirnya Presiden Sukarno memutuskan untuk membuat surat perintah yang ditujukan kepada Jendral Suharto.

Bagi Suharto meskipun surat tersebut terdapat banyak versi kemudian, tidak menyurutkan Suharto untuk mengeluarkan surat keputusan, di Jakarta, tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya di seluruh Indonesia. Disusul 18 Maret, keputusan menahan 15 menteri dan mengangkat sejumlah menteri AD interim pengisi pos-pos kosong. Reaksi terkejut presiden baru muncul setelah menerima laporan bahwa Men/Pangad telah membubarkan PKI dengan dasar surat perintah yang ia berikan. Presiden lalu mengeluarkan surat perintah susulan yang kemudian disampaikan khusus kepada Letjen Suharto oleh Waperdam II Leimena pada 13 Maret 1966. Akan tetapi, Suharto tidak memberikan reaksi. Sementara itu, ketiga jenderal yang datang ke Bogor sama sekali tidak pernah bertemu dengan Presiden Sukarno sesudah itu.

Akhir dari perjalanan Supersemar adalah penyerahan pemerintahan kepada Suharto yang dilaksanakan pada 22 Februari 1967 yang dituntaskan lewat sidang Istimewa MPRS 7-12 Maret. Sidang MPRS tersebut kemudian mengeluarkan ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari tangan Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden (Bagus Dermawan, 2008 :63).

### **LAHIRNYA ORDE BARU**

Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan rezim Suharto yaitu masa kepemimpinan Presiden kedua Republik

Indonesia. Orde baru merupakan sebuah aturan yang dijalankan kepada kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kembali pada ideology bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 secara mutlak. Orde Baru lahir karena beberapa faktor diantaranya adalah gagalnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Keadaan pemerintahan masa Orde Lama yang semakin parah hingga timbul kerusuhan yang terjadi didalam negeri. Percobaan perebutan kekuasaan oleh G30S/PKI yang gagal merupakan puncak dari kegagalan sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan Presiden Sukarno. Setelah peristiwa itu kekuasaan Sukarno dan PKI merosot tajam.

Keluarnya Supersemar yang ditandatangani Presiden Sukarno yang ditujukan kepada pengembannya yaitu Letjen Suharto yang berisi perintah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan mengadakan koordinasi angkatan lainnya. Turunnya Supersemar telah memberi jalan munculnya tatanan dan suasana baru yang diharapkan dapat membawa kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Tatanan dan suasana baru ini berbagai suatu fase baru dalam perjalanan sejarah Indonesia yaitu lahirnya Orde Baru. Oleh karena itu Supersemar dianggap merupakan tonggak berdirinya Orde Baru.

### **Suharto Presiden RI**

Akhir dari perjalanan Supersemar adalah penyerahan pemerintahan kepada Suharto yang dilaksanakan pada 22 Februari 1967 yang dituntaskan lewat sidang Istimewa MPRS 7-12 Maret. Sidang MPRS tersebut kemudian mengeluarkan ketetapan MPRS Nomer XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari tangan Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden (Bagus Dermawan, 2008 :63).

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1965-1968, ketika Jendral Suharto dipilih menjadi Presiden

Republik Indonesia. Era ini kemudian dikenal dengan era Orde Baru. Dalam perkembangannya pemerintahan Suharto dengan Kabinet Pembangunannya berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan melaksanakan pembangunan diberbagai bidang.

Dari urian diatas masuknya Indonesia dalam suatu tahapan baru yang dikenal dengan Orde Baru ini ditandai dengan suatu krisis ekonomi yang hebat. Pada saat naiknya Jendral Suharto sebagai Presiden yang baru berhasil melakukan berbagai tindakan yang mengarah kepada perbaikan ekonomi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Lahirnya Orde Baru dipicu karena berbagai kegagalan Pemerintahan Sukarno yang berakhir dengan pemberontakan oleh PKI. Peristiwa yang dikenal dengan G30S/PKI ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah. Pada saat itu munculah Jendral Suharto Sebagai pengemban Supersemar untuk mengatasi keadaan. Keberhasilan Jendral Suharto dalam merintis stabilitas politik nasional menimbulkan kepercayaan rakyat. Akhirnya melalui ketetapan sidang MPRS No. IX/MPRS/1966 Jendral Suharto diangkat sebagai Presiden. Setelah mendapatkan kepercayaan sebagai Presiden mulailah pemerintahan Suharto atau yang disebut dengan era Orde Baru.



Sejak Jendral Suharto menjabat sebagai Presiden maka terjadilah sentralitas kekuasaan. Kebijakan itu diambil pada awalnya untuk stabilitas yang bersifat operasional penyelamatan. Dampak dari kebijakan ini adalah terwujudnya stabilitas politik sehingga perekonomian rakyat dapat meningkat. Untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi maka dilakukan program pembangunan jangka panjang. Salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru adalah adanya stabilitas keamanan. Keberhasilan menciptakan keadaan yang baik bagi pembangunan ini hasil dari kembalinya sistem politik luar negeri yang tidak berpihak pada blok manapun. Ketidak berpihakan ini menyebabkan Indonesia mampu menjalin hubungan dengan pihak manapun. Selain itu Pembinaan keamanan yang ketat melalui ABRI untuk kelangsungan pembangunan.

**Daftar Pustaka**

- Agustina, Soebachman. 2015. *Spirit 7 Presiden RI*. Yogyakarta: PT. Surya Media Utama.
- Bagus, Darmawan (ed). 2008. *Warisan (dari pada) Suharto*. Jakarta. Kompas.
- G. Moedjiyanto. 1998. *Indonesia Abad ke 20 Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marshall, Green. 1992. *Dari SoekarnokeSoeharto: G 30 S/PKI Dari Kaca Mata Seorang Duta Besar*. Jakarta: PT Temprint.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mosanto, Luka. 2008. *Tangan Besi-100 Tiran Penguasa Dunia*. Yogyakarta: Galangprees.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern* (terjemahan Darmono Hardjowidjono). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sartono, Kartodirdjo. 1977. *Sejarah Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Taufiq Adi Susilo. 2016. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia Soeharto*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.